

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Konstitusi negara an Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan untuk memberikan perlindungan bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar serta orang tidak mampu yang pembiayaan kesehatannya dijamin oleh Pemerintah. Jaminan ini di tuangkan dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda). Namun karena keterbatasan anggaran, dan kuota peserta, RSUD Jombang mengalami masalah dengan pemenuhan anggaran dari pemerintah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak rumah sakit karena disamping dilarang untuk menolak pasien miskin, tapi anggaran yang diberikan terbatas.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RSUD Jombang serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di RSUD Jombang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara an dokumentasi.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Implementasi Pelayanan kesehatan terhadap pasien kurang mampu di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara umum dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua pasien masyarakat miskin yang memenuhi syarat, diberikan pelayanan dengan baik sesuai standar medis yang ditetapkan.

Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RSUD Jombang adalah, Peserta Jamkesmas dan Jamkesda banyak yang belum memahami tentang prosedur dan tatacara pemanfaatan kartu peserta disaat akan digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, namun demikian RSUD Jombang cukup fleksibel dan memberi banyak kemudahan terkait dengan persyaratan administrasi hal ini kemungkinan kurangnya sosialisasi terhadap sasaran program.

Dalam pendanaan Program Jamkesmas dananya telah dicukupi oleh Pemerintah melalui APBN namun karena prosedur yang cukup rumit menyebabkan distribusi dana ke rumah sakit sering terlambat yang mengakibtkan cash flow keuangan rumah sakit terganggu. Sedangkan untuk program Jamkesda kemampuan pendanaan dari Pemerintah Daerah sangat terbatas, namun dengan ditetapkannya RSUD Jombang sebagai BLUD dengan segala fleksibilitas pengelolaan yang dimiliki dapat menhasilkan pendapatan yang cukup baik sehingga bisa disubsidikan untuk membantu pasien Jamkesda.

ABSTRACT

Health Insurance for the poor society is a right must been given by the state. The poor society which can't pay thier health cost, was guaranteed by the state. The central government was create Health Insurance for the poor community program, but the budget is limited. The hospital be the implementator program, must solve this problem by thier resourche. The Regional State Hospital in Jombang, can solve this problem with succesfully, when many Regional State Hospital cant solve it.

The researcher use descriptive research with qualitative approache, which focus in how The Regional State Hospital in Jombang implemetated thier problem. To discribe deeply the data of this reseacrch, we collect data with observation, indeep interview, and script document which support this research.

Base on this reseach, we find that implementation of Health Insurace for the poor community program on the Regional State Hospital in Jombang was held sucsesfully because they never refused poor patient and always give same service to all patient. Regional health insurance also can be support poor patient which dont include in the database of Health Insurace for the poor community program from central government.

We get some stregh and weakness to implementate these program look like, limited of budgeting from regional government, qualitiy of service for poor patient and other. These problem can be solve because The Regional State Hospital in Jombang was be the Public service organization. They have authority to use thier profite to support limited budgeting from health Insurance from central and regional government.

Keyword : Implementation Program, Health Insurance, Poor community, Government.